

**SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA
PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

FITRI SARTIKA

NIM. 17133035

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG

Nama : FITRI SARTIKA
NIM/BP : 17133035/2017
Program Studi : D-III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2021

Diketahui Oleh
Koordinator Program Diploma III



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA
NIP. 198008092010121003

Disetujui Oleh
Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA
NIP. 198008092010121003

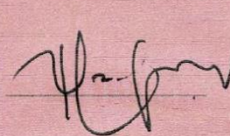
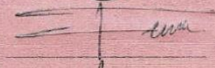
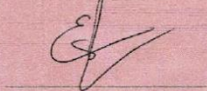
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG

Nama : FITRI SARTIKA
NIM/BP : 17133035/2017
Program Studi : D-III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE,MM,Ak,CA	(Ketua)	
2. Fefri Indra Arza, SE,Ak, M.Sc	(Anggota)	
3. Erly Mulyani, SE,M.Si, Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Sartika
Thn. Masuk/NIM : 2017/17133035
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Lansek /14 Februari 1999
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jorong Cilacap, Kenagarian Sungai Lansek
Judul Tugas Akhir : Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2020

Yang menyatakan

Fitri Sartika
NIM 17133035

ABSTRAK

Fitri Sartika : **Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang**

Pembimbing : **Halkadri Fitra, SE,MM,Ak.CA**

Pengelolaan laporan keuangan telah mengalami kemajuan yang akuntabel dan transparan dalam semua aspek transaksi keuangan daerah. Anggaran belanja khususnya belanja modal merupakan hal yang sangat penting dalam penataan anggaran daerah. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sistem akuntansi belanja modal telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang beralamat di jalan M.Yamin No.70, Kota Padang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Metode penelitian pada tugas akhir ini adalah penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung ke instansi terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya. sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang telah dilaksanakan dengan Peraturan-peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Belanja Modal

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa T'ala Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan-Nya penulis telah dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul: **“SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG.”** tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada manusia paling berjasa Atas kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang menulis rasakan yakni Rasulullah Salallahu ‘alaihi Wassalam karena beliau telah memperjuangkan Dunia yang dahulunya penuh kejahilnaan menjadi dunia yang penuh dengan ilmu Pengetahuan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA. selaku Koordinator Prodi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan selaku pembimbing Tugas Akhir saya yang selalu memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan tugas akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
4. Para Dosen dan staff pengajar serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di almamater ini.
5. Teristimewa kepada Mama Desni, ayah Zainuddin dan adik saya Muhammad Kholiq yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan, serta apapun yang penulis butuhkan.
6. Keluarga besar yang selalu memberikan do'a serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas akhir ini.
7. Spesial untuk Arianda Delano A, md yang telah memberikan bantuan, dukungan serta selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Sahabat sekaligus Tim sukses yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini Fadhilatul Fitri, Hilma Juwita dan Wiwin Pago sukses untuk kita semua. Aamiin yaAllah.
9. Dan semua teman-teman seperjuangan khususnya D3 Akuntansi 2017 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Oktober 2020

Fitri Sartika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Belanja Daerah	9
1. Pengertian Belanja Modal	9
2. Karakteristik Belanja Modal	12
B. Standar Akuntansi Pemeintahan	15
1. Pengertian Sistem Akuntansi	15
2. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan.....	17
3. Karangka umum system Akuntansi Keuangan Daerah.....	21
C. Belanja Daerah	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
1. Lokasi Penelitian	25
2. Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian	25
1. Sumber Data	25
2. Tahap Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Instansi	29
1. Profil Instansi.....	29
a. Sejarah Singkat BPKAD Kota Padang.....	29
b. Visi dan Misi BPKAD Kota Padang	30
c. Struktur Organisasi	31
d. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kota Padang	32
2. Sistem Akuntansi Belanja Modal pada BPKAD Kota Padang ..	40

B. Pembahasan.....	45
1. Prosedur Pencatatan,dan Pelaporan Belanja Modal pada BPKAD Kota Padang	45
a. Prosedur Pencatatan Belanja Modal.....	45
b. Prosedur Pelaporan Belanja Modal.....	47
2. Dokumen-dokumen yang Terkait dengan Pelaksanaan Pelaporan Sistem Akuntansi Belanja Modal	50
3. Sistem Akuntansi Belanja Modal pada BPKAD Kota Padang ...	52
a. Sistem Akuntansi Keuangan di Kota Padang	52
b. Sistem Akuntansi Belanja Modal pada BPKAD Kota Padang	54
c. Perbedaan Sistem Akuntansi Belanja untuk Belanja Modal, Belanja Operasi, dan Belanja Lainnya	57
d. Perlakuan Akuntansi Belanja Modal.....	64
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang	31
Gambar 4.2 Bagan Alir Dokumen Belanja Modal	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 CALK Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	21
Tabel 4.1 Klarifikasi Belanja Dalam LRA Menurut PSAP dan Kewenangan atas belanja	55
Tabel 2.2 Dokumen Belanja Daerah.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penelitian
2. Daftar pertanyaan wawancara
3. Dokumentasi Narasumber
4. Dokumentasi Dokumen Belanja Modal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada

propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Salah satu pos anggaran di dalam APBD adalah belanja modal. Menurut Halim (Abdullah et al. 2006), Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah asset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya *relative material*. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah asset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya *relative material*. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

Menurut konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka Panjang, terutama biaya untuk pemeliharaan aset tetap yang di hasilkan dari belanja modal tersebut. Kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keungan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka Panjang.

Menurut Gozali (2008) suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemda
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah diterapkan oleh pemda
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan kini standar akuntansi pemerintahan (SAP) memasuki babak baru dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, kini SAP didasarkan pada basis akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) tentang standar akuntansi pemerintahan. Adanya penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis

akrual telah memiliki landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independent dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah yang semula berbasis Kas ke berbasis Akrual juga menuntut Pemerintah Kota Padang untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menjadi basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang berorientasi kepada kemajuan laporan keuangan dan pertanggungjawaban menuju *good governance*, dengan demikian terwujud pemerintahan yang baik, bersih berwibawah, dan bertanggungjawab serta bebas dari pengaruh Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Padang dapat dikatakan sebagai pusat biaya karena ruang lingkup kegiatannya mencakup bidang pengelolaan keuangan dan aset. Pengendalian keuangan sangatlah penting dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Padang agar anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijanjikan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Padang merupakan perangkat daerah yang berkewajiban membantu Walikota dalam

menyelenggarakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, serta menyusun rencana strategis untuk menentukan arah pengembangan dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintah daerah (peraturan walikota padang nomor 35 tahun 2015 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset). Rencana strategis ini disusun dalam rangka mendukung terwujudnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Padang 2014-2019 dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang tersedia.

Belanja modal termasuk salah satu ruang lingkup kegiatan BPKAD kota Padang yang mencakup bidang pengelolaan keuangan dan aset. Belanja ini termasuk belanja yang tergolong ke dalam jenis belanja langsung dimana penganggarnya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah dan mengurangi kas daerah tetapi juga sekaligus menambah aset daerah, maka sangat perlu untuk memperhatikan sistem akuntansi belanja modal pada pemerintah daerah tersebut. BPKAD kota padang juga harus memperhatikan belanja modal dari faktor pertumbuhannya. Alasan mengapa belanja modal itu ada, atau mengapa suatu anggaran belanja modal itu dianggarkan yang bahkan penganggaran memiliki kecenderungan meningkat pada setiap tahun anggaran berikutnya, padahal aset hasil realisasi belanja modal memiliki sifat jangka panjang – lebih dari dua belas bulan, serta Sistem Akuntansi Belanja yang akan diterapkan oleh BPKAD selaku SPKD yang membantu Pemerintah kota Padang dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan harapan

agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan agar terjadinya pemerataan ekonomi yang ditunjukkan melalui nilai pertumbuhan ekonomi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dari tahun 2015 telah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga sistem akuntansi keuangan daerah mengalami transisi dari sistem akuntansi berbasis kas ke berbasis akrual mulai dari prosedur penerimaan, pencatatan, pengeluaran dan pelaporan setiap transaksi laporan keuangan.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja modal sepanjang periode 2014-2019 rata-rata tumbuh 4,1% pertahun disbanding dengan jenis belanja Kementerian dan Lembaga lainnya pertumbuhan belanja modal merupakan yang terendah. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan menjelaskan ada berapa faktor yang menyebabkan realisasi belanja modal cenderung lebih lambat, pertama belanja modal umumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur infrastruktur besar. Selain itu belanja modal seperti ini memiliki sifat multiyear, membutuhkan beberapa tahun pembangunan. Selain itu juga bahwa alokasi belanja modal tidak hanya berasal dari APBN dan APBD semata, tetapi juga dari melalui transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), fisik dan dana desa hingga Lembaga seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Permodalan Nasional Madani yang berkaitan erat dengan pendanaan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem akuntansi berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang khususnya pada sistem akuntansi belanja modal selama 3 (tiga) tahun menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. apakah sistem akuntansi belanja modal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Maka penulis tertarik untuk mengangkat tugas akhir yang berjudul **“SISTEM AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pencatatan, dan pelaporan belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang?
2. Apa saja dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang?
3. Apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang telah memenuhi suatu syarat sistem akuntansi yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pencatatan, dan pelaporan belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
2. Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan sistem akuntansi akuntansi belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
3. Mengetahui apakah sistem akuntansi belanja modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang sudah memenuhi syarat suatu sistem akuntansi yang baik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis, untuk memperoleh tambahan ilmu sehingga penulis mendapatkan gambaran nyata dari teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan pada program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
2. Bagi Perusahaan/ Instansi, dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan masukan bagi penelitian lain untuk mengadakan penelitian pada penulisan yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Untuk pencatatan belanja modal pada BPKAD Kota Padang sudah menggunakan sistem Akurual disetiap transaksinya. Pencatatan belanja modal dilakukan secara *Corrollary*, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal. Sedangkan untuk pelaporan belanja modal dilaporkan oleh bendahara pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan akan dilaporkan dalam bentuk surat pertanggung jawaban (SPT) setiap bulan.
2. Dokumen-dokumen yang digunakan terkait dengan perencanaan belanja modal pada BPKAD Kota Padang adalah RKA(Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sedangkan dokumen untuk pelaksanaan belanja modal adalah kwitansi pembelian, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nota pesanan,faktur, surat perintah membayar (SPM), surat penyediaan dana (SPD) dan berita acara serah terima barang.
3. Sistem Akuntansi Belanja Modal pada BPKAD Kota Padang telah memenuhi syarat sistem akuntansi yang baik karena telah dilaksanakan

dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Saran

1. Untuk BPKAD Kota Padang diharapkan Tetap mempertahankan Sistem Prosedur Belanja Modal dalam memepersiapkan penyediaan barang ditahun yang akan datang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih luas mencangkup sistem akuntansi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- A, M. H. (2014). *Perlakuan Akuntansi Belanja Modal pada DPPKAD Pemda Kota Palu*. Vol 2 No 3 September 2014.
- Bastian, indra. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Pablik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise. (2008). *Akuntansi keuangan Daerah*. jakarta: PT Indeks.
- Erlina. (2008). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Kedua*. Medan: USU Press.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: (UPP) STIMYKPN.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Pablik akuntansi Keuangan Daerah edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. S. (2006). *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintah dan sumber pendapatan*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* , vol.2, No. 2.
- Junnaini, Y. (2012). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Bandung : Salemba Empat.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga* . Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Ghalia indonesia.
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Kedua Atas Perda No 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah*.